

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PROMOSI OBJEK WISATA BONO DI
KECAMATAN TELUK MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Hardianto

NPM : 157310396

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah smatu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua Saya ayahanda Haidir, Ibunda Siti Hajar dan Saudara saya Abang Tarmizi, S.IP, Adek Saya Suryadi, Hasna, dan Perdi Zulfahmi yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan Lokal D angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis,

Hardianto



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	18

1. Konsep Pemerintahan	18
2. Azas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantu dalam Penyelenggaraan Pemerintah	23
3. Konsep Kebijakan Publik	28
4. Konsep Pengembangan	30
5. Konsep Evaluasi	34
a. Jenis-jenis Evaluasi	36
b. Proses Evaluasi	37
c. Fungsi Evaluasi	38
6. Konsep Kebijakan Pariwisata	40
7. Konsep Pembinaan Pariwisata	45
8. Promosi Pariwisata	51
B. Penelitian Terlebih Dahulu	53
C. Keraangka Pikiran	55
D. Konsep Operasional	55
E. Operasional Variabel	57
F. Teknik Pengukuran	58

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel Penelitian	63
D. Teknik Penarikan Sampel	63
E. Jenis dan Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	65
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	66

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan	67
--	----

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan	68
--	----

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	71
1. Identitas Responden	71
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Pemasaran Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	74
1. Efektivitas	75
2. Efisiensi	79
3. Kecukupan	84
4. Perataan	88
5. Responsivitas	93
6. Ketepatan	98
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Pemasaran Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	106

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR KEPUSTAKAAN	111
---------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	114
------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Tabel :	Halaman
I.1	Nama dan lokasi objek wisata yang ada di kabupaten pelalawan.....	10
I.2	Daftar Jumlah dan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Palelawan tahun 2016-2018.....	12
I.3	Kegiatan Promosi Pariwisata Bono Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan.....	13
I.4	Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Bono Ke Kaupaten Pelalawan Tahun 2016-2018.....	14
II.1	Penelitian Terdahulu.....	54
II.2	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.....	57
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.	60
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	66
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
V.2	Klasifikasi Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Umur.....	72
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	73

V.4	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.....	76
V.5	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.....	80
V.6	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	85
V.7	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.....	89
V.8	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	94
V.9	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	98
V.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	55
IV. 1 : Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti	114
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti	120
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti	123

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Hardianto
NPM : 157310396
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten
Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di
Kecamatan Teluk Meranti.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019


Hardianto

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PROMOSI OBJEK WISATA BONO DI
KECAMATAN TELUK MERANTI**

ABSTRAK

**Oleh :
Hardianto**

Pelaksanaan Promosi Objek Wisata Bono oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena dilakukannya kegiatan Promosi pariwisata mulai dari dalam Negeri sampai Luar Negeri, Pencapaian keberhasilan Promosi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan dan hambatan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti melalui enam indikator berada pada katagori “Cukup Terlaksana” dengan nilai rata-rata 23 dengan persentase 57%. Hal ini diketahui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti sudah melakukan kegiatan promosi pariwisata akan tetapi belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya ketetapan kegiatan promosi wisata Bono mulai dari dalam negeri sampai luar Negeri hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan promosi dan anggaran yang mendukung didalam kegiatan promosi pariwisata. Namun penulis menyarankan agar Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan meningkatkan jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan promosi pariwisata, meningkatkan jumlah anggaran promosi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama atasan dan bawahan didalam pencapaian upaya kegiatan pemasaran pariwisata.

Kata Kunci :Evaluasi, Tugas, Promosi

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTY OF
CULTURE AND YOUTH TOURISM AND SPORTS IN THE PELALAWAN
REGENCY IN THE PROMOTION OF BONO TOURISM OBJECTS IN
TELUK MERANTI DISTRICT**

ABSTRACT

**BY :
HARDIANTO**

The implementation of the Bono Tourism Object Promotion by the Department of Culture Tourism Youth and Sports in Pelalawan Regency aims to increase local revenue. Because tourism promotion activities are carried out ranging from domestic to foreign countries, the achievement of the success of Tourism Promotion is carried out by the Culture and Youth Office of Pelalawan Regency through Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The purpose of this study was to determine the implementation and obstacles of the duty of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports, Pelalawan Regency in the Promotion of Bono Tourism Objects in Teluk Meranti District. The research method used is a quantitative and qualitative merging method. The results of the implementation of the Task of the Department of Culture Tourism Youth and Sports in Pelalawan Regency in the Promotion of Bono Tourism Objects in Teluk Meranti District through six indicators are in the category of "Fairly Implemented" with an average value of 23 with a percentage of 57%. It is known that the Department of Tourism for Youth and Sports Culture of Pelalawan Regency in the Promotion of Bono Tourism Objects in Teluk Meranti District has carried out tourism promotion activities but it has not been carried out properly due to the absence of provisions for Bono tourism promotion activities ranging from domestic to overseas, this is due to lack of number of employees in carrying out promotional activities and supporting budgets in tourism promotion activities. However, the authors suggest that the Department of Culture Tourism Youth and Sports of Pelalawan Regency increase the number of employees in carrying out tourism promotion activities, increase the amount of tourism promotion budget, and increase cooperation between superiors and subordinates in achieving the efforts of tourism marketing activities.

Keywords: *Evaluation, Task, Promotion.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar cita-cita masyarakat sejahtera sebagaimana diinginkan dapat segera terlaksana.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah menyangkut banyak aspek dan segi, akan tetapi yang menjadi sorotan ialah persoalan hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Masalah hubungan kekuasaan ini senantiasa dijadikan objek pembahasan yang tiada akhir selama masih terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Konkuren sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 point (30) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi didaerah dimana point b Pariwisata dikatakan daerah untuk dapat mengelola objek pariwisata sebagai penunjang kesetabilan pendapatan asli Daerah dan meningkatkan serta pengembangan pariwisata yang ada di setiap daerah itu sendiri.

Pengembangan Pariwisata melalui Promosi merupakan suatu gejala yang multi kompleks dalam masyarakat yang dalamnya ada objek wisata, daerah tujuan wisata, hotel, took souvenir, pramuwisma, biro jasa, biro travel dan restoran.

Interaksi antara sub system sektor pariwisata merupakan sala satu sektor yang paling penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, oleh karena itu sektor pariwisata perlu dikembangkan agar dapat memberi sumbangan yang besar terhadap pendapatan masyarakat yang mengembangkan industry pariwisata tersebut. Sehingga disini pemerintah sangat penting agar pariwisata tersebut dapat berkembang dengan baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada Pasal 2 dikatakan bahwa kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan asas :

1. Manfaat
2. Kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan
5. Kemandirian
6. Kelestarian Partisipatif
7. Berkelanjutan
8. Demokratis
9. Kesetaraan
10. Kesatuan

Kepariwisataan disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhikebutuhan Jasmani, Rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada pasal 4 juga di sebutkan bahwa tujuan kepariwisataan adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus Kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya

- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta pada tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Salah satu kebijakan arti pentingnya sektor wisata ini adalah sebagai salah satu unsur peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga diketahui bahwa sektor wisata ini juga bisa lebih memperkenalkan daerah pada dunia luar terutama bagi sector pariwisata.

Pentingnya Pemerintah didalam pengelolaan Pariwisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan Asli Daerah akan tetapi hal ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan belum dapat mengembangkan objek wisata antara lain wisata Bono dikarenakan belum dilakukannya promosi Pariwisata mulai dari dalam daerah, luar Daerah sampai mancanegara, sehingga wisata Bono masih tertinggal dengan wisata Daerah lainnya sehingga perlunya pengembangannya.

Kegiatan Promosi pariwisata bono selama ini belum berlangsung sampai keluar Daerah maupun sampai Mancanegara sehingga perlunya kegiatan Promosi Pariwisata Bono lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat luas mulai dari luar Daerah sampai Mancanegara mengetahui akan keunggulan objek Wisata Bono dan bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Karena kegiatan promosi mempunyai fungsi sebagai wadah penyalur informasi dari pihak pengelola kepada konsumen atau wisatawan untuk datang berkunjung, kemudian sebagai wadah pembujuk dan sebagai wadah pengingat bagi konsumen tentang keberadaan suatu perusahaan atas produk yang dihasilkan.

Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten yang terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa. Potensi alam Kabupaten Pelalawan yang masih cukup baik seperti hutan rawa gambut, pantai dan populasi kecil serta potensi suku melayu asli merupakan daya tarik tersendiri bagi penunjangnya. Selain itu kabupaten Pelalawan akan berkembang sangat pesat menjadi pusat pariwisata yang berbudaya dimasa depan.

Interaksi antara sub system pariwisata yaitu antara atraksi wisata, promosi dan pemasaran, pasar wisata, transparan serta masyarakat penerima wisata, yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata itu telah menghasilkan saling terkait yang tinggi antara system ekonomi, social budaya dan politik. Pariwisata sebagai instrument interaksi antara manusia itu telah mendatangkan multipliner effect yang sangat tinggi bagi pendapatan kerja dan pengandaan neraca pembayaran serta meningkatkan devisa Negara serta hubungan internasional.

Objek Wisata Bono yang terletak di Kecamatan Meranti Kabupaten Pelalawan yaitu di Muara (kuala) Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan dan di Muara (kuala) Sungai Rokan di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat setempat menyebut Bono adalah air muara yang berasal dari hamparan air laut berpadu dengan air sungai yang mengalir kelaut sehingga menimbulkan ombak mencapai 3 meter.

Gelombang Bono atau ombak bono atau Bono Wave yang merupakan suatu fenomena alam, secara sederhana dapat disampaikan bahwa terjadinya

Ombak Bono, Terjadinya ombak adalah pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju muara (hilir).Selanjutnya dalam kajian lingkungan Mekanika Fluida (Environmental Fluid Mechanics), Bono disebut Tidal atau bore/eagir/eager/eygre. Secara ilmiah, gelombang bono merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi. Dimana kita akan menyaksikan sebuah gelombang besar yang layaknya terjadi ditengah laut, namun ini terjadi disebuah sungai air tawar.

Pengembangan Objek wisata Bono tentunya tidak terlepas dari kemampuan dan keterampilan kebijakan aparat pemerintah setempat dengan berbagai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan, sehingga potensi kepariwisataan dapat dikenal oleh orang banyak serta dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kebijakan Promosi objek wisata merupakan suatu tugas penting yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat susunan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan pada pasal 3 dimana Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.
2. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata.
3. Seksi Pengembangan Saran Prasarana dan Kelembagaan.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.
 2. Seksi Kesenian Film dan Nilai-nilai Tradisional.
 3. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Kepemudaan.
 2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Atlet.
 2. Seksi Kelembagaan.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana pelaksanaan promosi pariwisata berdasarkan Bidang Pariwisata pada pasal 13 dikatakan Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan destinasi Pariwisata, Promosi dan Promosi serta Pembinaan industri Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan industry pariwisata, pengembangan Promosi pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi dan industry pariwisata, pengembangan Promosi pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
- c. Penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan industry pariwisata, program pengembangan Promosi pariwisata dan program pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi dan industry pariwisata, pengembangan Promosi pariwisata pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- f. Memberikan dukungan baik secara moril, arahan teknis maupun pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai Bidang Tugasnya.

Secara khusus Seksi pengembangan Promosi pariwisata Dinas Pariwisata kabupaten Pelalawan adalah seksi yang menangani promosi dan pemasaran pariwisata dimana tugas Seksi Promosi pariwisata meliputi :

1. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pengembangan Promosi pariwisata berdasarkan tugas fungsi renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyiapkan program-program strategis untuk pengembangan promosi pariwisata.
3. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas secara lisan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pengembangan promosi pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
5. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksana kegiatan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
7. Mengelola pusat-pusat informasi pariwisata dan menertibkan bahan promosi serta meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah.
8. Melakukan penyediaan informasi kepariwisataan ke pusat-pusat layanan informasi pariwisata di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional.
9. Menerbitkan rekomendasi izin penertiban bahan promosi.
10. Melakukan menganalisa dan rencana pengembangan pasar pariwisata.
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders di bidang promosi pariwisata dalam maupun luar.

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Pelalawan sebagai pelaksana promosi produk wisata dengan potensi dan objek wisata beragam jenis wisata yang tersebar di berbagai daerah kabupaten Kabupaten Pelalawan, bahwa masih banyak wisata yang belum dipasarkan dan dikembangkan, inilah yang sebenarnya yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan nilai manfaat sumberdaya pariwisata nasional

terutama bagi daerah yang sekarang berupaya untuk memacu perkembangan pariwisata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah selain itu juga diketahui bahwa sektor wisata ini juga bisa lebih memperkenalkan daerah pada dunia luar terutama bagi sektor pariwisata.

Lokasi objek Pariwisata di Kabupaten Pelalawan masih tergolong banyak dan secara langsung berhadapan dengan alam dan masih asri sehingga perlunya pemerintah Kabupaten pelalawan didalam pengembangan pobjek pariwisata hingga melakukan promosi objek wisata sampai ke manca Negara. Adapun berikut objek wisata yang ada di kabupaten pelalawan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1.1 Nama dan lokasi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Istana Sayap	Kecamatan Pelalawan
2.	Taman Nasional Tesso Nilo	Kecamatan Ukui
3.	Danau Kajuik	Kecamatan Langgam
4.	Suaka Marga Satwa Kerumutan	Kecamatan Kerumutan
5.	Pusat Budaya Petalangan Danau Betung	Kecamatan Pangkalan Kuras
6.	Bono	Kecamatan Teluk Meranti
7.	Tugu Equator	Kecamatan Pangkalan Lesung

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas nama dan lokasi obyek wisata yang ada di kabupaten pelalawan , hal ini perlunya dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan pariwisata yang ada. Begitu juga pariwisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti perlu adanya kebijakan Pemerintah didalam pengembangan dan promosi pariwisata Bono hal ini dikarenakan salah satu pariwisata andalan Kabupaten pelalawan, yang mana Bono telah mendunia sampai ke manca Negara.

Program promosi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan adalah tujuan meningkatnya kunjungan pariwisata. Adapun Program Promosi yang dilakukan melalui Seksi Promosi pariwisata Tahun 2016-2018 adalah:

- a. Mengikuti Pameran dan Promosi Pariwisata di Tingkat Daerah Maupun diluar Daerah;
- b. Pemilihan Bujang Dara;
- c. Penyelenggaraan Tradisi Bakudo Bono;
- d. Pengembangan Aplikasi dan Informasi Pariwisata.

Berdasarkan pemaparan diatas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Promosi pariwisata dalam bentuk event yaitu mengikuti Louching pariwisata tingkat provinsi di kementerian pariwisata di Jakarta, Riau Expo 2016-2018, Jung Katil, Balimau Sultan, Hari Santri, Potang Balimau. Promosi dalam bentuk media cetak yaitu Brosur, Reflet.Promoso lewat media digital yaitu Aplikasi *Pesona Pelalawan*.website.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah selayaknya lebih serius memperhatikan tempat wisata dengan merealisasikan Promosi pariwisata yang bertujuan mewujudkan pariwisata terpadu yang layak dipasarkan maupun dipromosikan, Adapun potensi objekwisata yang telah dikembangkan dalam pemasarannya sampai ketaraf nasional dan internasional objek wisata di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016-2018 meliputi :

Tabel I.2 Daftar Jumlah dan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Palelawan tahun 2016-2018

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Kunjungan		
		2016	2017	2018
I	Wisata Alam			
1	Bono	1.883	762	661
2	Taman Nasional Tesso Nilo	486	1.089	320

1	2	3	4	5
3	Hutan Marga Satwa Kerumutan	32	35	32
4	Danau Tajwid	6.262	75	4.750
Jumlah		8.663	1.961	5.783
II	Wisata Sejarah			
1	Makam Sultan Mahmudsyah I	689	782	798
2	Masjid Hibah Pelalawan	1.028	1.379	1.298
3	Iatana Kerajaan Pelalawan	1.212	1.543	1.443
4	Komplek Makam Raja-raja Pelalawan	712	889	579
Jumlah		2.550	4.593	4.218
III	Wisata Budaya			
1	Upacara Potang Balimau	1.056	1.789	1.591
2	Balai Adat Langgam	1.600	1.600	1.550
Jumlah		2.656	3.389	3.141
IV	Religi			
	Komplek makam raja-raja pelalawan	150	210	191

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah objek wisata di kabupaten Pelalawan tahun 2016 sampai dengan 2018 melalui objek wisata alam, Sejarah dan Budaya dengan jumlah kunjungan yang semakin tahun semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini karena kurangnya promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata yang bertujuan agar pengunjung mengetahui pariwisata yang ada serta mengetahui potensi pariwisata yang ada dikabupaten Pelalawan terutama Objek Wisata Bono yang semakin Tahun semakin sedikit pengunjungnya.

Promosi objek wisata Bono perlunya didukung dengan pengembangan sarana prasarana, fasilitas pendukung dan potensi pegawai dalam mempromosikan objek wisata sampai kemanca Negara ada agar pengunjung wiasatawan tau akan keberadaan Bono dan dapat menikmatnya. Adapun Dinas Pariwisata Kebudayaan

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan dalam melakukann promosi pariwisata meliputi :

1. Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Kabupaten Pelalawan;
2. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata Kabupaten Pelalawan;
3. Penyediaan kemampuan Sumberdaya Manusia dan;
4. Penyediaan infrastruktur Pariwisata Kabupaten Pelalawan;

Kegiata Promosi kepariwisataan di kabupaten pelalawan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan serta mengatasi pengangguran. Pariwisata juga tidak bisa dipisahkan dari pembangunan suatu daerah karena merupakan salah satu sector andalan yang dapat meningkatkan *devisa* Negara. Adapun berikut Kegiatan Promosi Pariwisata Bono sebagai Berikut :

Tabel. 1.3 Kegiatan Promosi Pariwisata Bono Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan

No	Kegiatan	Tempat	Keterangan
1	Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara	Jakarta Convention Center	Tidak Terlaksana
2	Pelalawan Expo	Lapangan Kerinci	Terlaksana
3	Pekanbaru Expo	Purna MTQ Pekanbaru	Tidak Terlaksana
4	Sumatera Expo	Mega Mall Batam Center	Tidak Terlaksana

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan, 2019

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Promosi Pariwisata Bono Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan meliputi empat kegiatan dimana kegiatan promosi Bono hanya mengikuti sebanyak 2 dan tidak mengikuti sebanyak 2, Sehingga hal ini terlihat Kegiatan yang ada dengan tujuan promosi pariwisata belum terlaksana secara menyeluruh sehingga keberhasilan promosi pariwisata belum berlangsung dengan baik dan banyak masyarakat terutama di

luar daerah belum mengetahui akan adanya wisata Bono dengan keunikannya serta keindahannya.

Prpmosi Objek wisata di Kabupaten pelalawan dapat dilihat dari segi pengunjung sejauh mana pengunjung dapat mengetahui objek wisata yang adai di Kabupaten Pelalawan. Adapun dapat diketahui jumlah pengunjung objek wisata Bono pada tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Tabel I.4 : Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Bono Ke Kaupaten Pelalawan Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	2016	1.883
2	2017	762
3	2018	661

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, 2019.

Berdasarkan tabel I.3 diatas Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Bono Ke Kaupaten Pelalawan Tahun 2016-2018, dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan Bono semakin tahun semakin berkurang atau mengalami angka penurunan kunjungan wisatawan. Dimana diketahui Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan Bono 1.883 orang, tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebanyak 762 orang, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 661 orang. Menyikapi hal tersebut hal ini di picu kurangnya kecakapan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan didalam promosi Pariwisata Bono sehingga pengunjung Priwisata Bono semakin tahun semakin menurun.

Hal tersebut dilihat dalam Promosi pariwisata diketahui kurang ketersediannya komponen pariwisata, keterbatasan sarana dan prasaranan yang

memadai pendukung promosi pariwisata dan kurangnya Promosi promosi yang dilaksanakan sehingga tempat pariwisata belum dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat lokal maupun internasional. Adapun fenomena didalam pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dalam promosi objek wisata Bono sebagai berikut :

1. Efektivitas tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan dalam promosi objek wisata belum terlaksana secara merata sampai ke luar daerah serta belum tersediannya sarana bagi pengunjung wisatawan seperti hotel atau penginapan sehingga keadaan mempengaruhi sikap image pengunjung untuk mendatang dan tinggal lama menikmati aktivitas wisata, sehingga diketahui pengunjung objek pariwisata yang datang semakin tahun semakin berkurang melainkan pengunjung pariwisata hanya ditemui pada momen akhir tahun atau hari besar saja.
2. Belum efisiensi kegiatan promosi objek Pariwisata melainkan promosi objek pariwisata dilakukan apabila akhir tahun yang berkaitan terhadap masah libur tahunan itupun cenderung dilakukan dalam lingkup lokal yang seharusnya pemasarannya sampai dengan tingkat internasional secara rutin.
3. Belum terlaksananya Promosi pariwisata dengan baik dengan promosi pariwisata dapat dilakukan secara merata melalui media TV, Radio, Majala, Buku profil dan Koran.

Mencermati kondisi demikian tentunya pelaksanaan promosi pariwisata lebih ditingkatkan lagi dalam tingkat nasional maupun sampai dengan taraf internasional serta sarana dan prasarana pendukung promosi objek pariwisata yang ada, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan menetapkan judul :**“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan seperti yang telah di ungkap diatas maka dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti”**

C. Tujuan dan Keguna Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

b. Kegunaan

1. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam pelaksanaan Promosi Objek Wisata.
2. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
3. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan mutu Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*) menurut Maulidiah (2004;4).

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala social artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upayah untuk kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara

pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Safiie, 2007;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tatacara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislative, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarto (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilaya

suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan

suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. David Osborne (2004;186) Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;

- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang

menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. tata cara pelimpahan;
- c. tata cara penyelenggaraan; dan
- d. tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) prinsip pendanaan;

- 2) perencanaan dan penganggaran;
- 3) penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) penugasan urusan pemerintahan;
- 2) tata cara penugasan;
- 3) tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. prinsip pendanaan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

3. Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2010;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

4. Konsep Pengembangan

Menurut Sunyoto (2012: 145) “pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan,

kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian”. Pengembangan dilakukan untuk berfokus pada kebutuhan organisasi yang bersifat umum dalam jangka panjang. Kegiatan pengembangan dilakukan agar individu siap dan mampu untuk memikul tanggung jawab dan pekerjaan yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi.

Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa individu pegawai membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya ia mampu bekerja dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pengembangan karir, pendidikan, maupun pelatihan. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang tepat, maka ketergantungan organisasi terhadap rekrutmen sumber daya manusia akan berkurang.

Menurut Prabu (2007:44) Pengembangan adalah pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus jangka panjang. Menurut Mangkunegara pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Dari beberapa pengertian pengembangan karir di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengembangan karir diharapkan adanya peningkatan status dari para karyawan.

Mathis dan Jackson (2010:303) menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani

berbagai tugas dan untuk menumbuhkan kemampuan karyawan diluar kebutuhan pekerjaannya saat ini.

Sikula (2007;12) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya mengacu pada kepentingan staf dan personil yang ada di dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pembelajaran jangka panjang dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana manajer mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis, yang kemudian diimplementasikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mencapai efektivitas organisasi.

Menurut Hasibuan (2002;8) Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, termasuk ketertinggalan sumber daya manusia serta keragaman sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

Menurut Siagian dalam Sunyoto (2012:146) manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengembangan antara lain: Meningkatkan produktivitas kerja organisasi, memujudkan hubungan yang serasi antara dan bawahan, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, meningkatkan semangat kerja dan komitmen seluruh karyawan, mampu memperlancar komunikasi dan membuatnya lebih efektif, menyelesaikan konflik secara fungsional;

Menurut Marwansyah (2012:158) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang data mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, antara lain:

- 1) Dukungan dari manajemen puncak;
- 2) Komitmen para spesialis dan generalis;
- 3) Kemajuan teknologi yang digunakan;
- 4) Kompleksitas pada struktur organisasi;
- 5) Gaya Belajar setiap individu;

Menurut Hasibuan (2009:72) terdapat dua jenis pelatihan dan pengembangan, antara lain:

- 1) Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan atau dilakukan secara resmi oleh organisasi atau perusahaan untuk para karyawan.
- 2) Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara informal atau tidak resmi, misalnya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan atas keinginan serta usaha sendiri.

Menurut Sondang dalam Sunyoto (2012: 148) penyelenggaraan program pengembangan bagi tenaga kerja suatu organisasi diperlukan tahap-tahap pengembangan, yaitu:

- 1) Penentuan kebutuhan;
- 2) Penentuan sasaran;
- 3) Penetapan isi program;
- 4) Identifikasi prinsip-prinsip belajar;
- 5) Pelaksanaan program;
- 6) Penilaian pelaksanaan program;

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengembangan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian". Pengembangan dilakukan untuk berfokus pada kebutuhan organisasi yang bersifat umum dalam jangka panjang. Kegiatan pengembangan dilakukan agar individu siap dan mampu untuk memikul tanggung jawab dan pekerjaan yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi.

5. Konsep Evaluasi

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Draha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.

3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan mitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan ssuatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari

3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin

Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

Menurut Dunn, (2003;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung criteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.

5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut

6. Konsep Kebijakan Pariwisata

Kebijakan kepariwisataan dapat dirumuskan : “segala sesuatu tindakan instansi pemerintahan dan badan/organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan yang kepariwisataan itu sendiri.” Keidupan kepariwisataan dipengaruhi oleh adanya tindakan-tindakan kebijakan, kompleksitas yang timbul dalam pariwisata itu sendiri. Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati para stakeholder.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, berbunyi :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan Ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung tilingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikat adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia taun 1945.

14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan prinsip :

1. Menjunjung tinggi nilai norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungannya;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat ;
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antara pemengku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan;
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan atas dasar manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan dan kesatuan yang di wujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pembangunan kepariwisataan mencakup pembangunan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan wisata tirta. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan bisa berupa pengembangan objek wisata, pembinaan kepariwisataan. Pengembangan berarti melakukan suatu perubahan kepada sesuatu yang sudah ada. Jadi objeknya sudah ada tetapi dilakukan perbaikan-perbaikan berupa pembangunan. Pengembangan objek wisata adalah satu upaya untuk mengelola/melakukan perubahan menjadi lebih baik dalam arti potensi objek

wisata yang ada dikembangkan (dibangun) supaya menjadi objek wisata yang siap untuk dijual.

Menurut Hamim (2003:1) Pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek keidupan fisik dan non fisik yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan serta daya saing pariwisata indonesia antara lain keunikan dan potensi sumberdaya atraksi wisata baik yang berbasis budaya maupun alam; ketersediaan sarana pendukung kegiatan

pariwisata (akomodasi, rumah makan, pemandu, dll); ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, air); kemudahan akses, dan beberapa aspek penting lainnya seperti keamanan dan kenyamanan.

Syaukani (2004:1) mengatakan bahwa pembangunan pada akekatnya adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi ke situasi lain yang dianggap lebih baik.

Di bidang kepariwisataan, permasalahan yang dihadapi adalah belum tergarapnya potensi objek-objek wisata, masih seperti mutiara yang terpendam.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada bab VIII pasal 30, disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- b. Menetpkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerahnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kabupaten/kota.
- i. Memeliara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- j. Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

7. Konsep Pembinaan Pariwisata

Menurut Thoha (1997:7) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam halini menunjukkan adanya kemajuan,

peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni :

1. Pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan.
2. Proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan adalah usaha memelihara, melati dan meningkatkan menjadi lebih baik, sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

1. Penyuluhan.
2. Pengarahan.
3. Bimbingan.

Dalam Ismani (1996:31) Negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah mampu mendaya gunakan potensi yang ada di daerah sehingga dapat di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi tetap menjaga kelestariannya.

Dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri kegiatan perjalanan manusia, tentu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, karena pariwisata tidak berdiri sendiri.

Menurut Ridwan (2012:25) Saat ini pengembangan pariwisata di Indonesia dititik beratkan pada setiap daerah, karena daerah yang memiliki potensi serta objek dan daya tarik wisata (ODTW)

Dalam tulisan artikel Sjarifuddin Akil telah disebutkan beberapa kebijakan penataan ruang dalam mendukung pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan.
2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya.
4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stake holder, dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa).
5. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Didalam RTRWN ini diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya.
6. Pengembangan dukungan sarana-sarana transportasi secara terpadu intermode dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah.

Ada beberapa faktor yang perlu diketahui dalam perencanaan pengembangan pariwisata, yaitu :

1. Wisatawan, dalam hal ini perlu diketahui karakteristik wisatawan yang akan diharapkan untuk datang atau berkunjung.
2. Transportasi, bagaimana transportasi yang tersedia untuk dapat membawa wisatawan dari negara asal ke daerah tujuan wisata (DTW) serta transportasi lokal yang dilakukan untuk melakukan perjalanan wisatawan selamanya selama di daerah tujuan wisata (DTW);
3. Obyek dan daya tarik wisata, bagaimana dengan kesiapan potensi wisata dan obyek wisata, baik alam, budaya, maupun obyek buatan yang ada daerah tujuan wisata, apakah sudah memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan serta memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :
 - a. Apa yang dapat diliha (*something to see*),
 - b. Apayang dapat dilakukan (*someting to do*),
 - c. Apayang dapat di beli (*something to buy*).
4. Fasilitas Pelayanan, fasilitas apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata, terutama akomodasi, restoran, pelayanan umum seperti bank/ money changer, kantor pos, rumah sakit, dan sebagainya.
5. Infrastruktur Pendukung, bagaimana ketersediaan infrastruktur pendukung pendukung, seperti air bersih, listrik, tempat pembuangan sampah, hal ini sangat penting dalam pengembangan pariwisata;

6. Masyarakat Lokal, kesiapan dan dukungan masyarakat lokal, karena masyarakat lokal mempunyai peran penting dalam pengembangan pariwisata.
7. Informasi, wisatawan perlu mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya, agar wisatawan secepatnya mengambil keputusan.

Menurut Karyadi (2003 : 12) bahwa pembinaan terdapat tugas antara lain :

1. Pemberian petunjuk.
2. Pemberian Pendidikan dan latihan.
3. Pemberian bimbingan.

Bimbingan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan yang dibina untuk mematuhi segala ajakan pengajaran dan bimbingannya sehingga tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi dan pada akhirnya kreatifitas mereka dapat tumbuh dan berkembang. Pimpinan bisa dilakukan teradap bidang apa saja, siapa saja dan untuk tujuan tertentu.

Dalam hal ini pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan dalam bidang penyelenggaraan kepariwisataan. Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, maka dilakukan berbagai upaya seperti yang terdapat pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai berikutnya ;

- a. Peningkatan Kualitas dan kuantitas produk pariwisata
- b. Penyebaran pembangunan produk pariwisata.
- c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata
- d. Penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata
- e. Peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaa pariwisata.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat.
- g. Perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata
- h. Peningkatan promosi dan Promosi produk wisata; dan
- i. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional.

Selanjutnya dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui :

- a. Penempatan peraturan dan ketentuan pelaksanaan perizinan, standar atau kualitas mutu produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. Pemberian bimbingan untuk meningkatkan peran dari :
 - 1) Penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak dibidang usaha kepariwisataan;
 - 2) Aparatur pemerintahan dibidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaa pariwisata;
 - 3) Masyarakat; dan
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan

serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaa pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.

Promosi penyelenggaraan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/Kota diserakan pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.

Upaya pembinaan dan pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan bangsa, memperkenalkan kekayaan peninggalan sejarah serta keindahan alam yang ada di indonesia baik yang ada di wilayah profinsi, kabupaten/kota. Sehubungan dengan ini pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata untuk masyarakat terutama remaja dan pemuda perlu ditingkatkan. Kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan pariwisata perlu ditingkatkan. Kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan pariwisata perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan dan usaha-usaha lainnya seperti usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman dan usaha-usaha lainnya yang mendukung pengembangan kepariwisataan.

8. Promosi Pariwisata

Menurut Lupiyoadi (2005:12) Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran, yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Yoeti (2004:40) menjelaskan bahwa promosi secara sederhana bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak atau kelompok tertentu bahwa ada produk yang ditawarkan untuk dijual. Sebagai usaha menarik minat calon pembeli terhadap barang yang ditawarkan, dilakukanlah promosi yang bertujuan memperkenalkan produk, kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan produk lain, serta manfaat dan kegunaannya. dengan langkah ini khalayak umum akan menjadi kenal dengan produk yang kita miliki. selanjutnya diharapkan kepada mereka akan membeli atau menggunakan produk tersebut.

Promosi menurut Herlen Farlow dalam bukunya yang berjudul “Publicizing and Promotion Programs” (2002:101), menyatakan bahwa “Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran. Promosi merupakan usaha mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang sesuatu hal untuk mempengaruhi konsumen”.

Kotler (2004:38) memberikan pengertian sales promotion (promosi penjualan) sebagai insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Grewal and Levy (2008:5-7) memberikan pengertian sales promotion (promosi penjualan) sebagai insentif spesial atau programprogram menarik yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk dan jasa tertentu. Jadi, promosi penjualan adalah aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan meningkatkan penjualan perusahaan.

Sunaryo (2013:177), promosi pariwisata (tourism promotion) adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menawarkan produk wisata dengan menginformasikan kepada calon wisatawan dan dapat ditempuh dengan cara memberitahukan tempat-tempat dimana wisatawan dapat melihat atau melakukan pembelian produk wisata dengan waktu dan tempat tertentu. Kegiatan promosi yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan suatu produk wisata. Peningkatan aktivitas promosi wisata dapat dilakukan melalui produk dan jasa kreatif yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi pariwisata.

Berdasarkan penjelasan di atas Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran. Promosi merupakan usaha mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang sesuatu hal untuk mempengaruhi konsumen.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Adapun berikut Penelitian terdahulu dengan meliputi persamaan dan perbedaan penelitian sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

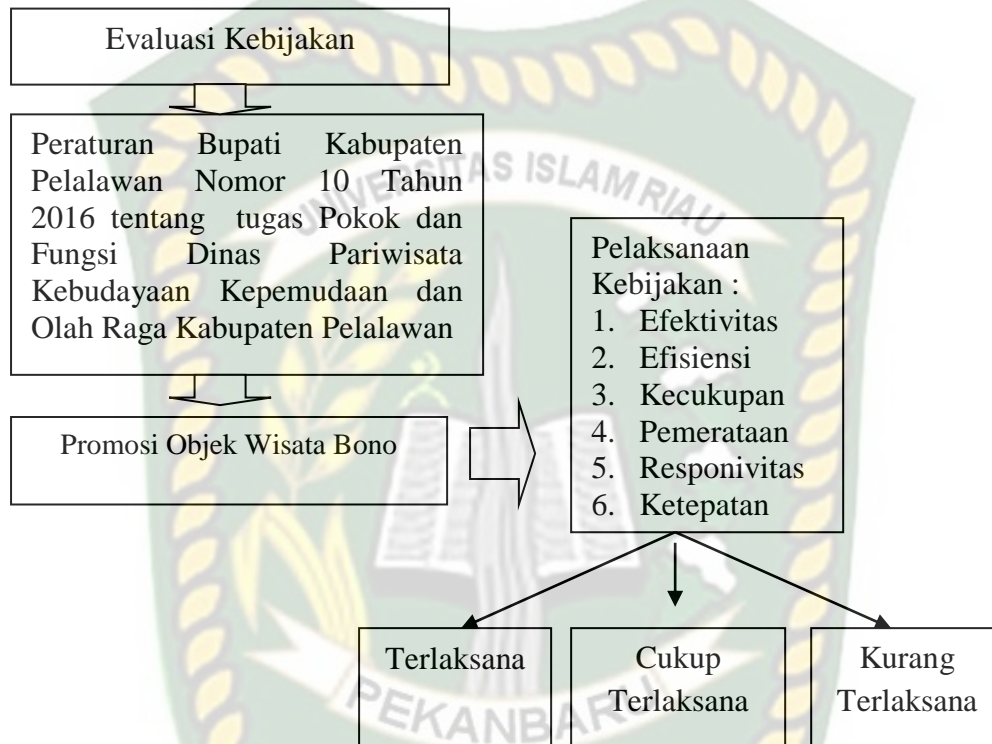
No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Satya Hadi Hogantara , 2010	Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono	1. Metode Kualitatif 2. Teori yang digunakan 3. Hasil penelitian	1. Lokasi penelitian
2	Faisal Yunan Siregar, 2012	Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti	1. Teori yang digunakan 2. Hasil penelitian	1. Metode Kuantitatif 2. Lokasi Penelitian
3	Elyasip S Sembiring , 2013	Promosi Objek Wisata Bono Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan	1. Teori yang digunakan 2. Hasil penelitian	1. Metode Kuantitatif 2. Lokasi Penelitian

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Penelitian Terdahulu mulai dari tahun penelitian 2010 sampai dengan penelitian 2013 yang mana objek sipenelitian adalah promosi pariwisata Bono dimana peneliti ini terletak di Kecamatan teluk meranti Kabupaten pelalawan.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan

mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ke arah yang lebih baik.

2. Tugas dalam penelitian ini adalah ketetapan pelaksanaan atas tujuan yang terarah terhadap bidang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti
3. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Dalam Promosi pariwisata Di Kabupaten Pelalawan
4. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Dalam penelitian ini adalah sebagai pelaksana Promosi Objek pariwisata di Kabupaten Pelalawan.
5. Promosi pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memperkenalkan pariwisata yang ada dalam bentuk mempromosikan pariwisata sampai dalam Negeri dan Luar Negeri
Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :
6. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
7. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
8. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan program dan peraturan tersebut yang diberikan terhadap.

9. Pemerataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
11. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan,	Evaluasi Pelaksanaan Tugas	Efektivitas	1. Pengembangan pariwisata Bono. 2. Promosi Objek Wisata Bono. 3. Pengamatan objek wisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Pelaksanaan Promosi pariwisata. 2. Penetapan kegiatan Promosi pariwisata. 3. Sasaran Promosi pariwisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)		Kecukupan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan. 2. Kerjasama dengan masyarakat 3. Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Promosi sampai keluar daerah. 2. Promosi melalui media. 3. Ketetapan biaya objek pariwisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Kenyamanan terhadap pengunjung. 2. Penyediaan fasilitas. 3. Menyediakan Sarana pariwisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Ketepatan	1. Promosi objek wisata pariwisata secara luas. 2. Pengembangan pendukung Promosi Objek Wisata Bono. 3. Evaluasi hasil Promosi objek pariwisata Bono.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indicator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Responivitas dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80)..

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan promosi pariwisata belum terlaksana dengan baik serta optimal dalam

mempromosikan pariwisata dikarenakan masih kurangnya jumlah pegawai didalam mempromosikan objek wisata bono serta sarana prasarana pendukung kegiatan promosi baik dalam negeri maupun secara internasional sehingga penelitian ini di fokuskan pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Bidang Pariwisata, Pegawai Bidang Pariwisata dan Masyarakat Pengunjung pariwisata Bono, adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Pariwisata.	1	1	100%
2	Pegawai Bidang Pariwisata.	10	10	100%
3	Masyarakat Pengunjung Pariwisata Bono.	~	30	6%
Jumlah		11	41	372%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Mengingat sebagian dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berbeda, maka pengambilan sampel untuk Kepala Bidang

Pariwisata, Pegawai Bidang Pariwisata digunakan teknik penarikan *sensus* yaitu populasi dijadikan sampel penelitian secara menyeluruh dikarenakan jumlah populasi tidak terlalu besar, dimana ditetapkan sampel sebanyak 11 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat pengunjung pariwisata Bono dengan menggunakan teknik *incidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai nara sumber, dimana ditetapkan berjumlah 30 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi promosi pariwisata.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

Yaitu teknik pengumpul data yang membuat daftar pertanyaan (angket) yang di gunakan untuk mendapatkan data mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang di inginkan serta yang di anggap perlu dalam peneitian ini.

c. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut nanti nya akan di kelompokkan ke masing-masing variabel. Kemudian di analisa secara kuantitatif yang hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel,

angka, persentase, dan di lengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulan nya.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2019														
		Agustus			September			Oktober			November			Desember		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■												
2	Seminar Up				■	■	■									
3	Revisi UP						■									
4	Penelitian Lapangan							■	■	■						
5	Analisis Data							■	■	■						
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)										■	■	■			
7	Konsultasi Revisi Skripsi											■	■			
8	Ujian Komfretif Skripsi													■	■	■
9	Revisi Skripsi															■
10	Penggandaan Skripsi															■

Sumber : Olah Data Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.282.181,47 Ha atau 13,21% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 391.140,47 Ha atau (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 18.716,16 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

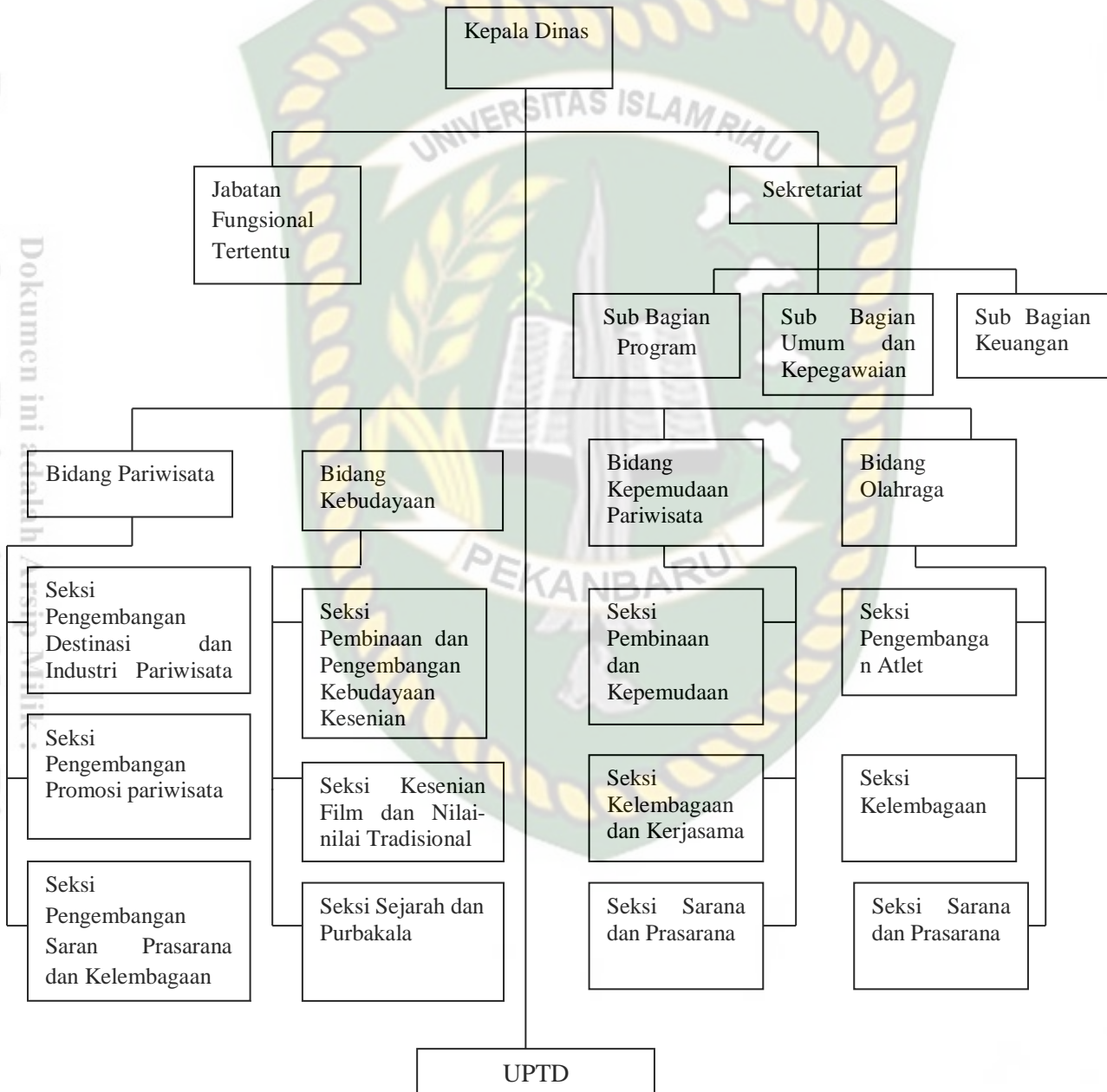
Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25° Lintang Utara sampai 0,20° Lintang selatan dan antara 100,42° Ujur Timur sampai 103,28° Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Keteman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu serta Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan

Gambar IV.1 Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan 2019

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 72 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan, pada pasal 3 dimana Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 4. Sub Bagian Program
 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 6. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.
 2. Seksi Pengembangan Promosi pariwisata.
 3. Seksi Pengembangan Saran Prasarana dan Kelembagaan.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.
 2. Seksi Kesenian Film dan Nilai-nilai Tradisional.
 3. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Kepemudaan.
 2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Atlet.
 2. Seksi Kelembagaan.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana pelaksanaan Promosi oleh Bidang Pariwisata melalui seksi Pengembangan Promosi pariwisata pada pasal 13 meliputi tugas :

1. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pengembangan Promosi pariwisata berdasarkan tugas fungsi renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyiapkan program-program strategis untuk pengembangan promosi pariwisata.

3. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas secara lisan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pengembangan Promosi pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
5. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksana kegiatan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
7. Mengelola pusat-pusat informasi pariwisata dan menertibkan bahan promosi serta meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah.
8. Melakukan penyediaan informasi kepariwisataan ke pusat-pusat layanan informasi pariwisata di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional.
9. Menerbitkan rekomendasi izin penertiban bahan promosi.
10. Melakukan menganalisa dan rencana pengembangan pasar pariwisata.
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders di bidang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisisioner, wawancara dan kuisisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	32	77.5%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 32 orang, dimana jumlah 32 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	30%
3	40-49 tahun	20	50%
4	≥ 50 tahun	8	20%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 50%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39

sebanyak 13 orang atau sekitar 30% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	25%
4	Diploma	16	37.5%
5	Sarjana	14	35%
6	Pasca Sarjana	1	2.5%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2015

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 16 orang atau sekitar 37.5% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 2.5% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti

Dalam Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata dengan memberikan pelayanan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban. menjelaskan terhadap pelaksanaan tugas Pariwisata Kesenian Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.

Promosi Objek Wisata Bono oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan di Pariwisata Kesenian Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya dengan baik dan hal ini telah memberi kepuasan kepada masyarakat. Hal ini dinilai dari tugas bidang pariwisata didalam melakukan Promosi Objek Wisata Bono Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan langsung kelapangan dan turut serta dalam apa saja bentuk Promosi dengan tujuan agar pariwisata bono dapat diketahui dan dinikmati sampai ke mancanegara.

Pelaksanaan Promosi Objek Wisata Bono Objek oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan belum terlaksana Promosi dengan baik sehingga mengakibatkan kurang diketahui pariwisata Bono sehingga hal ini mengurangi pendapatan asli Daerah. Melihat keadaan tersebut perlunya adanya kebijakan yang lebih terarah oleh Di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan Promosi Bono sampai keluar kota hingga mancanegara. Dari data

yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden unjung pariwisata, maka penulis akan mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Promosi Objek Wisata Pariwisata Di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata Bono.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Promosi Objek Wisata Bono oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dengan pengertian efektivitas seperti itu maka dalam pelaksanaan Promosi objek pariwisata Bono tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektivitas Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pengembangan pariwisata Bono.
2. Promosi Objek Wisata Bono.
3. Pengamatan objek wisata Bono.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pegembangan pariwisata Bono.	6 (15%)	29 (71%)	5 (15%)	40
2	Promosi Objek Wisata Bono.	8 (20%)	25 (61%)	7 (20%)	40
3	Pengamatan objek wisata Bono.	7 (17%)	20 (49%)	13 (34%)	40
Jumlah		21	74	25	120
Rata-rata		7	25	8	40
Persentase		18%	62%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Pegembangan pariwisata Bono dimana responden penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (15%) dengan alasan, Pegembangan pariwisata Bono sudah terlaksana dengan menyediakan sarana-prasarana pendukung pengembangan pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 71% dengan alasan Pegembangan pariwisata Bono sudah terlaksanakan akan tetapi pengembangan sarana-prasarana hanyalah sebatas pengembangan saja melainkan tidak berpotensi secara luas terhadap pengembangan pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan,

Pengembangan pariwisata Bono dinilai hanyalah sekedar saja melainkan tidak melihat hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian untuk item penilaian Promosi objek wisata yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, Promosi Objek Wisata Bono mulai dari dalam daerah sampai keluar daerah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 61% dengan alasan, Promosi Objek Wisata Bono mulai dari dalam daerah sampai dengan luar daerah akan tetapi Promosi yang dilakukan hanyalah diwaktu hari besarnya saja melainkan tidak adanya Promosi wisata setiap harinya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Promosi Objek Wisata Bono dinilai belum maksimal diman diketahui Promosi dilakukan hanyalah hari besar saja melainkan tidak adanya ketetapan waktu yang ditetapkan.

Kemudian untuk item penilaian Pengamatan objek wisata Bono yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Pengamatan objek wisata Bono dengan memasarkan pariwisata unggulan secara menyeluruh yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pengamatan objek wisata Bono berdasarkan pariwisata yang ada dikabupaten Pelalawan agar dapat memasarkan pariwisata unggulan akan tetapi pengamatan belum secara merata dilakukan sehingga tidak memotivasi Dinas Pariwisata dalam melakukan pengembangannya melainkan hanya melihat dan mengembangkan sekedar saja. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 responden atau 34% dengan alasan, Sejauh ini Dinas Pariwisata dalam melakukan Pengamatan objek wisata Bono hanya mengembangkan sekedarnya saja melainkan belum efektif secara merata.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 25 atau 62% dengan alasan pelaksanaan Promosi pariwisata dinilai belum terlaksana dengan baik mulai dari pengembangan serta memasarkan pariwisata melainkan Promosi wisata Bono hanyalah sebatas program saja melainkan tidak melihat hasil pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan sehingga Promosi yang dilaksanakan tidak dipasarkan dengan ketetapan dikarenakan pariwisata yang ada belum terlihat efektif. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Pengembangan pariwisata Bono, Promosi Objek Wisata Bono, Pengamatan objek wisata Bono terhadap pariwisata yang ada di kabupaten Pelalawan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi objek wisata tanggal 09 Oktober 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kami sudah pelaksanaan Promosi pariwisata Bono dengan melaksanakan pengembangan pariwisata Bono sampai dengan pengamatan objek wisata agar pelaksanaan Promosi pariwisata Bono sesuai dengan pariwisata yang ada meskipun beberapa pariwisata belum dapat dipasarkan sampai ke luar daerah dikarenakan belum terciptanya kelengkapan sarana pariwisata secara baik dikarenakan kurangnya anggaran dalam pengembangannya tetapi kami selalu berusaha mengembangkan pariwisata yang ada.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti bahwa pelaksanaan Promosi Pariwisata dinilai belum terlaksana dengan baik mulai dari pengembangan serta memasarkan pariwisata melainkan Promosi wisata Bono hanyalah sebatas program saja melainkan tidak melihat hasil pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan sehingga Promosi yang dilaksanakan tidak dipasarkan dengan ketetapan dikarenakan pariwisata yang ada belum terlihat efektif, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori Cukup Terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk

Meranti tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Promosi pariwisata Bono.
2. Penetapan kegiatan Promosi pariwisata Bono.
3. Sasaran Promosi pariwisata Bono.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Promosi pariwisata Bono.	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Penetapan kegiatan Promosi pariwisata.	12 (38%)	20 (49%)	8 (20%)	40
3	Sasaran Promosi pariwisata Bono.	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
Jumlah		27	70	23	123
Rata-rata		9	23	8	40
Persentase		22%	58%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan

Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, pelaksanaan Promosi mulai dari dalam daerah sampai dengan luar daerah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan Promosi yang dilakukan mulai dari dalam daerah sampai dengan luar daerah melalui media TV, Koran dan Radio, akan tetapi dalam Promosi pariwisata di nilai belum secara optimal dilaksanakan melainkan hanyalah sebatas pemberitahuan saja tidak ada ketetapan waktu rutin dan cenderung yang dipasarkan hanyalah pariwisata unggulan saja seperti Bono di Kecamatan Meranti. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, pelaksanaan Promosi pariwisata dinilai belum terlaksana dengan optimal dimana pariwisata yang di pasarkan hanyalah pariwisata unggulan saja dan pemasarannya hanyalah sekedarnya saja sehingga kurangnya pengunjung untuk menikmati pariwisata yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan kegiatan Promosi yang mana responden penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata Bono yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 38 % dengan alasan, Penetapan kegiatan Promosi pariwisata dengan memasarkan pariwisata terutama hari libur melalui media. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, penetapan kegiatan Promosi pariwisata Bono sudah terlaksana terutama menjelang hari libur, akan

tetapi seharusnya Promosi memiliki ketetapan waktu yang agar masyarakat secara menyeluruh tau bahwa adanya pariwisata di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, penetapan kegiatan Promosi pariwisata dinilai belum adanya ketetapan waktu Promosi melainkan hanya hari besar saja sehingga mengurangi jumlah pengunjung pariwisata yang ada.

Kemudian untuk item penilaian Sasaran Promosi pariwisata yang mana responden penelitian pada berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, sasaran Promosi pariwisata sudah tepat sasaran melalui media agar masyarakat mengetahui objek wisata Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan sasaran Promosi pariwisata melalui media TV, Radio, Koran terhadap masyarakat agar mengetahui pobjek pariwisata yang ada di Kabupaten Pelalawan, akan tetapi dalam Promosi pariwisata belum tepat sasaran dimana sasaran Promosi hanyalah sekedaranya saja melalui media dikarenakan anggaran dalam melaksanakan Promosi objek wisata rendah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, sasaran Promosi pariwisata dinilai masih lemah dimana secara menyeluruh objek wisata Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan belum diketahui masyarakat dan media yang tersedia hanyalah sekedaranya saja dalam pelaksanaan Promosi melainkan tidak adanya jadwal rutin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam Promosi pariwisata Bono dimana dikatakan dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 23 atau 58% dengan alasan pelaksanaan Promosi pariwisata melalui media TV, Radio belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya biaya dalam melaksanakan Promosi sehingga tidak adanya ketetapan waktu rutin dalam Promosi pariwisata. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Pelaksanaan Promosi pariwisata, Penetapan kegiatan Promosi pariwisata, Sasaran Promosi pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi objek wisata tanggal 09 Oktober 2019 menjelaskan bahwa :

“... Pelaksanaan usaha pencapaian hasil Promosi Objek Wisata Bono dengan menerapkan kegiatan pariwisata melalui media TV, Radio, Koran mulai dari dalam daerah setempat sampai dengan keluar daerah, hal kami lakukan agar pobjek wisata yang ada dikabupaten pelalawan dikenal masyarakat, meskipun belum adanya waktu rutin dalam Promosi objek wisata dikarenakan kurangnya anggaran yang ditetapkan akan tetapi Dinas Pariwisata selalu berusaha untuk memasarkan objek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan secara menyeluruh.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dimana pelaksanaan Promosi pariwisata melalui media TV, Radio belum terlaksana dengan baik dengan penetapan waktu didalam Promosi pariwisata, sehingga dalam pelaksanaan Promosi objek wisata Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan katagori Cukup Terlaksana.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan pengertian kecukupan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui kecukupan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Kerjasama antara atasan dan bawahan.
2. Kerjasama dengan masyarakat
3. Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata Bono.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa inidapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antara atasan dan bawahan.	10 (24%)	25 (63%)	5 (12%)	40
2	Kerjasama dengan masyarakat.	12 (41%)	23 (59%)	5 (12%)	40
3	Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata Bono.	11 (24%)	20 (49%)	9 (24%)	40
Jumlah		33	68	19	120
Rata-rata		11	23	6	40
Persentase		27%	56%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan responden penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti Dalam Promosi Objek Wisata yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, kerjasama dengan atasan dalam Promosi wisata dengan memberikan arahan terhadap bawahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 63% dengan alasan kerjasama antara atasan dan bawahan dalam Promosi wisata Bono sudah terlaksana dengan memberikan arahan terhadap bawahan akan tetapi hal ini belum terlaksana dengan baik melainkan hanya sekedar pemberitahuan aja dan tidak memiliki ketetapan

arahan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 12% dengan alasan, kerjasama atasan terhadap bawahan belum terlihat terlaksana dimana dalam pelaksanaan kerjasama atasan dan bawahan hanya sebatas arahan saja melainkan tidak adanya ketetapan dalam menunjang kinerja pegawai dalam Promosi Objek Wisata Bono.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan masyarakat yang mana responden penelitian pada berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 41% dengan alasan, kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Bono. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 59% dengan alasan, kerjasama dengan masyarakat dinilai sudah terlaksana dalam pengembangan pariwisata akan tetapi dalam pengembangan pariwisata Bono dinilai hanyanya masyarakat tertentu sehingga pengembangan pariwisata sampai dengan Promosi belum tercapai melainkan hanyanya Promosi hanya sekedarnya saja terhadap objek wisata unggulan saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 12% dengan alasan, kerjasama dengan masyarakat dinilai hanyalah sekedarnya agar Promosi objek pariwisata dapat diketahui oleh masyarakat lainnya melainkan tidak adanya ketetapan kerjasama dengan masyarakat dalam Promosi Objek Wisata Bono.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata yang mana responden penelitian berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan, Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata guna berhasilnya Promosi pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, penetapan Promosi pariwisata dengan mengarahkan ketetapan pariwisata agar tercapainya tujuan Promosi yang diinginkan, akan tetapi ketetapan peraturan Promosi pariwisata belum menunjang keberhasilan Promosi pariwisata sehingga pengunjung pariwisata tidak banyak yang datang dalam melihat objek wisata yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi melalui pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 56% dengan alasan belum terlaksanaany kerjasama atasan dengan bawahan serta penetapan peraturan terhadap Promosi pariwisata Bono dengan baik, serta kerjasam dengan masyarakat sehingga dapat dilihat bahwa berkurangnya pengunjung pariwisata Bono setiap tahunnya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kecukupan dalam pelaksanaan penerapan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam

Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Kerjasama antara atasan dan bawahan, Kerjasama dengan masyarakat, Penetapan peraturan Promosi objek pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi objek wisata tanggal 09 Oktober 2019 menjelaskan bahwa :

“... sejauh ini pelaksanaan Promosi Objek Wisata Bono, saya sebagai atasan selalu melakukan kerjasama antar atasan dengan bawahan agar tercapainya pelaksanaan Promosi pariwisata Bono secara luas, begitu juga kami melakukan kerjasama terhadap masyarakat agar masyarakat tau objek wisata Bono melalui ketetapan peraturan yang ada, meskipun sejauh ini pengunjung pariwisata setiap tahunnya berkurang tetapi kami selalu berusaha agar pariwisata yang ada dapat diketahui masyarakat secara luas...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dimana belum terlaksananya kerjasama atasan dengan bawahan serta penetapan peraturan terhadap Promosi pariwisata Bono dengan baik, serta kerjasam dengan masyarakat sehingga dapat dilihat bahwa berkurangnya pengunjung pariwisata Bono setiap tahunnya, sehingga dalam pelaksanaan Promosi objek wisata Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan katagori Cukup Terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata

Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Promosi sampai keluar daerah.
2. Promosi melalui media.
3. Ketetapan biaya objek pariwisata Bono.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Promosi sampai keluar daerah	7 (17%)	23 (59%)	10 (24%)	40
2	Promosi melalui media	8 (20%)	27 (66%)	5 (15%)	40
3	Ketetapan biaya objek pariwisata	11 (27%)	20 (49%)	9 (24%)	40
Jumlah		26	70	24	120
Rata-rata		9	23	8	40
Persentase		22%	58%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam dalam item penilaian Promosi sampai keluar daerah responden penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau 17% dengan alasan, Promosi sampai keluar daerah sudah terlaksana agar pengunjung pariwisata mengetahui objek wisata Bono. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Promosi objek wisata sampai keluar daerah dinilai blum terlaksana dengan baik dimana diketahui masyarakat pengunjung pariwisata belum terlihat semakin tahun semakin banyak melainkan semakin menurunnya masyarakat pengunjung pariwisata disetiap tahunnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Promosi objek wisata sampai keluar daerah dinilai belum tercapai dengan optimal dimana diketahui jumlah pengunjung semakin tahunnya semakin berkurang.

Kemudian untuk item penilaian Promosi melalui media yang mana responden penelitian berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, pelaksanaan Promosi objek pariwisata sudah terlaksana melalui media agar masyarakat sampai kelauar daerah mengetahui objek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 66% dengan alasan, Promosi objek wisata melalui media sudah terlaksana dengan

memasarkan melalui media TV, Radio dan Koran sampai keluar daerah, melainkan Promosi objek wisata hanya sekedarnya saja dikarenakan kurangnya anggaran dalam melaksanakan Promosi sehingga Promosi yang terlaksana tidak adanya ketetapan pemasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Promosi objek wisata melalui media hanya sekedarnya saja dikarenakan kurangnya anggaran dalam melaksanakan Promosi sehingga Promosi yang terlaksana tidak adanya ketetapan pemasaran.

Kemudian untuk item penilaian Ketetapan biaya objek pariwisata yang mana responden penelitian berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan berjumlah 11 responden atau 27 % dengan alasan, ketetapan biaya objek wisata berdasarkan ketetapan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam biaya masuk pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, biaya objek wisata belum adanya penetapan biaya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melainkan biaya objek wisata cenderung tidak sesuai dengan yang ditetapkan melainkan hanya biaya kebiasaan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, penetapan biaya terhadap objek wisata dinilai belum adanya ketetapan melainkan hanyalah kebiasaan masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi melalui pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam kategori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 56% dengan alasan Pelaksanaan Tugas Promosi objek pariwisata dengan memasarkan objek pariwisata Bono sampai keluar daerah meskipun belum adanya jadwal Promosi secara rutin serta menetapkan tarif masuk dalam menikmati objek wisata hal ini pembiayaan objek wisata Bono belum adanya ketetapan melainkan hanya biasa masyarakat setempat dalam memberikan biaya masuk. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui, Promosi sampai keluar daerah, Promosi melalui media, Ketetapan biaya objek pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi objek wisata tanggal 08 Februari 2017 menjelaskan bahwa :

“... Pelaksanaan Promosi objek pariwisata Bono oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan sejauh ini saya rasa sudah berlangsung mulai dari pemasran objek wisata Bono melalui media sampai dengan keluar daerah dan penetapan tarif objek wisata secara menyeluruh meskipun dinilai semua belum terlaksana dengan baik akan tetapi kami akan berupaya dalam mengembangkan pariwisata serta Promosi sampai keluar daerah...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten

Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti diketahui belum adanya jadwal Promosi secara rutin serta menetapkan tarif masuk dalam menikmati objek wisata hal ini pembiayaan objek wisata Bono belum adanya ketetapan melainkan hanya biasa masyarakat setempat dalam memberikan biaya masuk. sehingga dalam pelaksanaan Promosi objek wisata Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan katagori Cukup Terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian responsivitas seperti itu maka dalam pelaksanaan Promosi Objek Wisata tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui responsivitas Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Kenyamanan terhadap pengunjung.
2. Penyediaan fasilitas.
3. Menyediakan Sarana pariwisata.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kenyamanan terhadap pengunjung	9 (24%)	23 (56%)	8 (20%)	40
2	Penyediaan fasilitas	10 (20%)	24 (66%)	6 (15%)	40
3	Menyediakan Sarana pariwisata	14 (24%)	18 (51%)	8 (22%)	40
Jumlah		33	65	22	120
Rata-rata		11	21	8	40
Persentase		26%	54%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Kenyamanan terhadap pengunjung responden penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 4% dengan alasan, Kenyamanan terhadap pengunjung melalui penyediaan tempat tempat penjagaan pengunjung pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56% dengan alasan, kenyamanan pengunjung melalui penjagaan agar pengunjung pariwisata dapat menikmati pariwisata yang ada melalui penyediaan tempat-tempat atau pos penjagaan akan tetapi penjagaan yang diberikan hanyalah apabila ramainya pengunjung melainkan tidak setiap saat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, kenyamanan terhadap para pengunjung pariwisata dinilai belum terlaksana dengan baik hal ini dimana

penjagaan keamanan hanyalah apabila pengunjung ramai melainkan tidak setiap saatnya adanya penjagaan.

Kemudian untuk item penilaian Penyediaan fasilitas yang mana responden penelitian pada Promosi objek wisata yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, penyediaan fasilitas pariwisata melalui hotel, rumah makan, tempat ibadah dan jalan pengunjung pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 66% dengan alasan, pasilitas yang disediakan dinas pariwisata dan kebudayaan dinilai belum tersedia secara menyeluru dimana seperti hotel masih tersedia jauh dari tempat pariwisata melainkan milik pihak lain dan jalan pengunjung belum tersedia layak melainkan masih jalan tanah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, fasilitas yang disediakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum menunjukkan ketersediaan fasilitas pengunjung pariwisata seperti hotel tempat penginapan serta jalan menuju pariwisata dinilai masih belum layak.

Kemudian untuk item penilaian Menyediakan Sarana pariwisata yang mana responden penelitian pada Promosi Objek Wisata Bono yang menyatakan terlaksana sebanyak 14 responden atau 24% dengan alasan, penyediaan sarana pariwisata seperti travel angkutan pariwisata agen atau biro perjalanan pariwisata yang diberikan terhadap pengunjung pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 51% dengan alasan dalam penyediaan sarapariwisata dinilai belum secara luas menyediakan sarana pariwisata melainkan hanya himbauan saja. Selanjutnya untuk responden yang

menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 12% dengan alasan, penyediaan sarana terhadap pengunjung pariwisata dinilai belum menunjukkan adanya sarana yang tersedia sehingga masyarakat hanya datang sendirinya ketempat pariwisata melainkan tidak adanya biro angkutan pariwisata yang telah disediakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui penerapan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 54% dengan alasan dalam kebijakan Promosi pariwisata Bono Dinas Priwisata dan Kebudayaan sudah memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap para pengunjung pariwisata baik dari segi penyediaan saran dan fasilitas terhadap pengunjung meskipun secara menyeluruh belum tersediannya secara maksimal namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya menyediakan apa yang menjadi pendukung kemajuan pariwisata. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti di Kecamatan Tampan melalui Kenyamanan terhadap pengunjung, Penyediaan fasilitas, Menyediakan Sarana pariwisata

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata Bono tanggal 09 Februari 2017 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini dalam pengembangan pariwisata Bono dalam meningkatkan pengunjung pariwisata kami menyediakan fasilitas seperti tempat penginapan, rumah makan, tempat ibadah serta sarana pengunjung pariwisata seperti biro angkutan pariwisata dan kenyamanan bagi para pengunjung wisatawan meskipun sejauh ini kami belum secara optimal dapat menyediakan pendukung dalam pengembangan pariwisata dikarenakan biayanya anggaran belum memadai tetapi berlahan kami sudah mulai menyediakan meskipun masih bekerjasama dengan pihak swasta....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti diketahui kebijakan Promosi pariwisata Bono Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah memberikan keamanan dan nyaman terhadap para pengunjung pariwisata baik dari segi penyediaan saran dan fasilitas terhadap pengunjung meskipun secara menyeluruh belum tersediannya secara maksimal namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya menyediakan apa yang menjadi pendukung kemajuan pariwisata. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata dalam katagori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian ketepatan seperti itu maka dalam pelaksanaan Promosi objek wisata tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui ketepatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Promosi objek wisata pariwisata secara luas.
2. Pengembangan pendukung Promosi objek wisata.
3. Evaluasi hasil Promosi Objek Wisata Bono.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Promosi objek wisata pariwisata secara luas.	9 (20%)	25 (66%)	6 (15%)	40
2	Pengembangan pendukung Promosi objek wisata.	11 (38%)	24 (49%)	5 (20%)	40

1	2	3	4	5	6
3	Evaluasi hasil Promosi objek wisata Bono.	8 (17%)	24 (59%)	8 (24%)	40
Jumlah		28	73	19	120
Rata-rata		9	24	7	40
Persentase		22%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Promosi objek wisata pariwisata secara luas responden Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Promosi Objek Wisata Bono secara luas mulai dari dalam daerah sampai dengan luar daerah. Selanjutnya menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Promosi objek wisata secara luas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinilai sudah melaksanakan Promosi pariwisata dari dalam daerah sampai dengan luar daerah akan tetapi Promosi yang diberikan hanyalah daerah sekitar yang tidak jauh dari tempat pengunjung pariwisata Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15 % dengan alasan, Promosi objek wisata hanyalah disekitar tempat wisata saja melainkan tidak sampai keluar daerah yang jauh dari wilaya pariwisata serta sampai kemanca negara sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya objek wisata secara luas yang ada di Kabupaten pelalawan.

Kemudian untuk item penilaian Pengembangan pendukung Promosi objek wisata yang mana responden penelitian pada berdasarkan Promosi Objek Wisata yang menyatakan terlaksana sebanyak 11 responden atau 38% dengan alasan, penetapan Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan

Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui pengembangan pendukung Promosi objek pariwisata seperti fasilitas, sarana pariwisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 49% dengan alasan pendukung pengembangan objek wisata Bono dinilai sudah terlaksana dengan menyediakan sarana dan fasilitas bagi penunjang pengembangan pariwisata akan tetapi dalam penyediaannya masih belum optimal secara menyeluruh dikarenakan rendahnya anggaran dalam pengembangan pariwisata secara menyeluruh. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 20% dengan alasan, pengembangan pendukung pariwisata dinilai belum dapat dalam mendukung pengembangan pariwisata hal ini belum tersedianya fasilitas, sarana yang disediakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara merata sehingga pariwisata yang ada tidak berkembang secara pesat melainkan hanya sebatas pariwisata saja.

Kemudian untuk item penilaian Evaluasi hasil Promosi objek pariwisata yang mana responden penelitian pada Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 17% dengan alasan, evaluasi hasil Promosi objek wisata sudah terlaksana dengan melihat apa yang menjadi kendala dalam Promosi objek wisata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, evaluasi terhadap objek wisata yang ada dengan melihat sejauh mana hasil Promosi yang dilakukan dan apa yang

menjadi kendala, kan tetapi terlihat belum adanya ketetapan pembaharuan terhadap manajemen pengembangan pariwisata melainkan hanya sebatas himbauan oleh pimpinan melainkan tidak adanya perubahan secara menyeluruh. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 24 % dengan alasan, evaluasi terhadap hasil objek pariwisata dinilai masih lemah dimana terlihat belum terciptanya hasil Promosi objek wisata terhadap hasil yang lebih memuaskan melainkan semakin berkurangnya pengunjung yang akan menikmati pariwisata yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 24 atau 60% dengan alasan Promosi Objek Wisata Bono secara luas belum sampai keluar daerah yang jauh dari objek wisata melainkan Promosi yang dilakukan hanyalah sebatas daerah local dan sekitarnya serta tidak anya evaluasi terhadap hasil dari Promosi objek wisata sehinga tidak memperbaharui apa saja yang akan diperbaharui terhadap meningkatkan hasil objek pariwisata baik dari segi manajemen serta penyediaan fasilitas, sarana pendukung pengembangan objek pariwisata. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Promosi

objek wisata pariwisata secara luas, Penetapan Pengembangan pendukung Promosi objek wisata, Evaluasi hasil Promosi objek pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Susi Amiliana sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata Bono tanggal 09 Februari 2017 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam pelaksanaan usaha pencapaian hasil Promosi Objek Wisata Bono Di Kecamatan Teluk Meranti dengan mengadakan evaluasi hasil pariwisata mulai dari pengembangan objek wisata Bono, fasilitas dan sara pendukung pariwisata. Hal ini kami lakukan demi menunjang berkembangnya pariwisata dan pengunjung dapat menikmati pariwisata yang ada dikabupaten pelalawan, meskipun terlihat belum secara menyeluruh objek pariwisata yang ada dapat dikembangkan dikarenakan sehingga objek wisata unggulanlah yang terlebih dahulu dikembangkan serta dana anggaran yang masih kurang sehingga pengembangan pariwisata tidak terlaksana dengan baik...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti belum terlaksananya Promosi Objek Wisata Bono secara luas belum sampai keluar daerah yang jauh dari objek wisata melainkan Promosi yang dilakukan hanyalah sebatas daerah local dan sekitarnya serta tidak anya evaluasi terhadap hasil dari Promosi objek wisata sehinga tidak memperbaharui apa saja yang akan diperbaharui terhadap meningkatkan hasil objek pariwisata baik dari segi manajemen serta penyediaan fasilitas, sarana pendukung pengembangan objek pariwisata. Hal ini didapat melalui pendataan, Promosi objek wisata pariwisata secara luas, Pengembangan pendukung Promosi objek wisata, Evaluasi hasil Promosi objek pariwisata. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas

Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan dalam Promosi Objek Wisata dalam katagori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	7 (22%)	25 (62%)	8 (24%)	40
2	Efisiensi	9 (22%)	23 (58%)	8 (20%)	40
3	Kecukupan	11 (27%)	23 (56%)	6 (17%)	40
4	Perataan	9 (22%)	23 (58%)	8 (20%)	40
5	Responsivitas	11 (26%)	21 (54%)	8 (20%)	40
6	Ketepatan	9 (22%)	24 (59%)	7 (18%)	40
Jumlah		56	139	45	200
Rata-rata		9	23	8	40
Persentase		23%	57%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti untuk indicator

Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 17%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 24 atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 atau 24%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana 11 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 17%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 22%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam

Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator kelima Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 23 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8 orang atau 20%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti sudah terlaksana meskipun belum terlaksana dengan baik dengan melakukan Promosi objek wisata sampai keluar daerah serta mengembangkan pariwisata yang ada melalui penyediaan fasilitas dan sarta pariwisata serta melakukan evaluasi terhadap hasil Promosi agar terlihat apa saja kendala dalam pengembangan pariwisata meskipun secara menyeluruh dalam Promosi objek wisata dinilai masih kurangnya anggaran yang tersedia dalam mendukung objek

pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pelalawan sehingga dapat dikatakan pemasarn objek wisata dalam katagori cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 23 atau persentase 57%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34% -65% maka Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dalam katagori cukup terlaksana.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti, meliputi :

1. diketahui belum tersedianya pendukung kegiatan promosi objek wisata bono seperti iklan atau gambar baliho kemegahan alam Bono dan akses wisata bono sehingga pengunjung tertarik berkunjung untuk menikmati wisata Bono.
2. Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan promosi seperti media TV, Radio sehingga Bono hanya dikenal di daerah saja atau hanya nama objek wisata Bono melainkan tidak mengetahui apa yang keindahan alam yang dipromosikan di wisata Bono tersebut.

3. Belum terjalannya Kerjasama didalam promosi objek wisata bono Dinas didalam penetapan uapaya-upaya pengembangan promosi Bono dan masyarakat didalam pendung pengembangan wisata Bono.
4. Belum adanya kegiatan Promosi bagi pengunjung mulai dari tarif jemputan, tempat penginapan dan tarif menikmati objek wisata Bono sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui akan adanya ketetapan promosi yang di hendel oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan belum melakukan evaluasi terkait promosi Pariwisata dengan tujuan agar pariwisata Bono dapat berkembang sesuai dengan keingin masyarakat pengunjung.
6. Belum terlaksana promosi Pariwisata Bono melalui kegiatan event sampai keluar daerah maupun manca Negara sehingga Objek wisata Bono dapat dikenal keshuruh daerah maupun mancanegara.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Dalam Promosi Objek Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat dikategorikan cukup terlaksana.

Sementara hambatan dalam pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Diketahui meliputi

1. Diketahui bahwa belum tersedianya pendukung kegiatan promosi objek wisata bono seperti iklan atau gambar baliho kemegahan alam Bono dan akses wisata bono
2. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan promosi seperti media TV, Radio.
3. Belum terjalinnya kerjasama didalam promosi objek wisata bono Dinas Pariwisata dengan Organisasi perangkat Daerah dan Masyarakat didalam penetapan upaya-upaya kemajuan pengembangan Bono.
4. Belum adanya ketetapan kegiatan Promosi bagi pengunjung mulai dari tarif jemputan, tempat penginapan dan tarif menikmati objek wisata Bono.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan belum melakukan evaluasi terkait promosi Pariwisata dengan tujuan agar pariwisata Bono dapat berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat pengunjung,

6. Serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan belum melakukan promosi Pariwisata Bono melalui kegiatan *event* sampai keluar daerah maupun manca Negara.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melakukan promosi melalui iklan atau baliho secara khusus akan alam wisata Bono dan Kemegahannya.
2. Hendaknya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan menyediakan secara khusus sarana prasarana pendukung kegiatan promosi seperti media TV, Radio sehingga Bono dikenal sampai keluar Daerah dan Manca Negara.
3. Hendaknya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melaukan kerjasama dengan Organisasi perangkat Daerah dan Masyarakat setempat didalam melakukan upaya-upaya pengembangan Bono.
4. Perlunya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melakukan Promosi bagi pengunjung mulai dari tarif jemputan, tempat penginapan dan tarif menikmati objek wisata Bono sehingga pengunjung tau biaya yang dikeluarkan.
5. Perlunya adanya evaluasi terkait promosi Pariwisata dengan tujuan agar pariwisata Bono dapat berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat pengunjung

6. Perlunya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan melakukan promosi Pariwisata Bono melalui kegiatan event sampai keluar daerah maupun manca Negara sehingga Objek wisata Bono dapat dikenal kesluruh daerah maupun mancanegara



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Anwar Prabu A. A Mangkunegara 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Andrew F Sikula, 2007. *Sistem Manajemen Kinerja, Edisi Terjemahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- David Osborne, 2004. Peter Plastrik. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Jakarta, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Hamim, 2003, *sistem perencanaan Strartegis dalam Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Melayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ismani HP. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Malang, Ikip Malang.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Lupiyoadi. 2005. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Penerbit: Angkasa. Jakarta

- Mathis, Robert L. dan Jackson John H. 2010. *Human Resource Management. Edisi Tigabelas*, USA: South-Western, Cengage Learning.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Muhammad Ridwan, 2012, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta. PT. Sofmedia
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndrah, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.Pembangunan.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Sedarmayanti, 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Penerbit Mandar Maju,Bandung.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan DestinasiPariwisata Konsep dan Aplikasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Solichin Abdul Wahad, 2002. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

Syafhendri. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

Syafiie, Inu Kencana, dkk. 2004. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka cipta. Jakarta.

_____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Syaukani, 2004, *Otonomi Daerah demi Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, Nuansa Mandiri.

Soeharto Edisi 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.

Thoha Miftah, 1997. *Pembina Organisasi (proses diagnose dan intervensi)*. Jakarta, PT. Taja Grafindo Persada.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yoeti Oka, A. 2004. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Bandung.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan.